

TATA KELOLA KELEMBAGAAN DPRD KOTA SURABAYA: PERAN FRAKSI PSI DALAM MENDORONG EFEKTIVITAS FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN

Iva Yemima Tyrza Nogo¹ Adi Susiantoro²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yemimanogo19@gmail.com, adisusiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam mendorong efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Kajian ini dilaksanakan melalui kegiatan magang selama empat puluh hari kerja di Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya pada periode 4 Agustus hingga 10 Oktober 2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara informal terhadap staf serta tenaga ahli fraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fraksi PSI menjalankan peran strategis dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi prinsip *good governance* tampak melalui mekanisme rapat terbuka, publikasi pandangan umum fraksi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses aspirasi. Namun, pelaksanaan magang menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, padatnya agenda legislatif, serta ruang partisipasi mahasiswa yang terbatas. Secara keseluruhan, Fraksi PSI berhasil menunjukkan praktik tata kelola kelembagaan yang progresif dan berorientasi pada pelayanan publik serta memperkuat transparansi lembaga legislatif daerah.

Kata kunci : Tata kelola kelembagaan, DPRD, Fraksi PSI, legislasi, pengawasan, *good governance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Indonesian Solidarity Party (PSI) Faction in promoting the effectiveness of legislative and supervisory functions within the Regional People's Representative Council (DPRD) of Surabaya City. The research was conducted through a forty-day internship at the PSI Faction of the Surabaya City DPRD, from August 4 to October 10, 2025. The method employed was a qualitative descriptive approach using observation, documentation, and informal interviews with staff and legislative experts. The findings indicate that the PSI Faction plays a strategic role in establishing institutional governance that is transparent, accountable, and participatory. The implementation of good governance principles is evident through open meetings, the publication of factional statements, and the involvement of the public in the aspiration process. However, several challenges were encountered during the internship, such as limited time, a dense legislative agenda, and restricted participation for interns. Overall, the PSI Faction has demonstrated a progressive model of institutional governance oriented toward public service and the strengthening of transparency within the local legislative institution.

Keywords : institutional governance, DPRD, PSI Faction, legislation, supervision, *good go*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi lokal yang dimiliki. Dalam sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, peran lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai representasi rakyat yang berperan dalam pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan daerah. DPRD tidak hanya menjadi lembaga perwakilan, tetapi juga menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi utama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang semakin kompleks, tata kelola kelembagaan DPRD menjadi isu strategis karena menentukan sejauh mana lembaga tersebut mampu melaksanakan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola kelembagaan (institutional governance) pada dasarnya mengacu pada cara suatu organisasi atau lembaga publik mengelola sumber daya, wewenang, dan proses pengambilan keputusannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan demokratis, lembaga DPRD di berbagai daerah dituntut untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaannya. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme kerja antarfraksi, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tumpang tindih kewenangan antara legislatif dan eksekutif, rendahnya transparansi dalam pembahasan kebijakan, serta lemahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kota Surabaya, sebagai salah satu daerah otonom terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa dan dinamika sosial ekonomi yang sangat tinggi, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya menuntut lembaga legislatif yang responsif, adaptif, dan berintegritas. DPRD Kota Surabaya memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa kebijakan daerah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana tata kelola kelembagaan DPRD dijalankan menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan.

Dalam struktur kelembagaan DPRD, fraksi memiliki peranan yang sangat menentukan. Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik di lembaga legislatif yang bertugas mengkoordinasikan sikap politik anggota-anggotanya, sekaligus menjadi wadah pembentukan kebijakan internal dan pandangan resmi terhadap isu-isu daerah. Keberadaan fraksi bukan hanya sebagai identitas partai, tetapi juga sebagai unsur penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD. Dalam konteks ini, setiap fraksi memiliki gaya kepemimpinan, strategi komunikasi, dan pendekatan politik yang berbeda-beda, tergantung pada ideologi dan nilai-nilai yang dianut partai politiknya. Salah satu fraksi yang menarik untuk dikaji di DPRD Kota Surabaya adalah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebagai partai politik

yang relatif baru, PSI dikenal dengan karakter politiknya yang modern, progresif, serta menolak praktik politik lama yang tertutup dan elitis. PSI menempatkan nilai-nilai transparency, anti-corruption, dan youth empowerment sebagai pilar utama perjuangannya. Di DPRD Kota Surabaya, Fraksi PSI menampilkan wajah politik yang berbeda dengan menonjolkan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan keberpihakan terhadap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya berupaya mengimplementasikan prinsip *good governance* melalui mekanisme kerja kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Rapat-rapat fraksi seringkali terbuka untuk publik, dan pandangan umum fraksi terhadap kebijakan daerah secara rutin dipublikasikan melalui kanal digital resmi partai. Sikap politik fraksi ini yang lebih terbuka memberikan warna tersendiri dalam dinamika DPRD Kota Surabaya yang selama ini cenderung formal dan birokratis. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Fraksi PSI dalam memperkuat tata kelola kelembagaan DPRD juga tidak ringan. Keterbatasan jumlah anggota, keterikatan dengan kebijakan fraksi pusat, serta tantangan membangun budaya politik baru di tengah sistem politik yang masih dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis menjadi hambatan tersendiri dalam mendorong efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan. Meskipun demikian, upaya Fraksi PSI untuk memperkuat tata kelola lembaga legislatif daerah tetap menjadi contoh penting bagaimana nilai-nilai reformasi birokrasi dapat diimplementasikan pada tataran legislatif daerah.

Kajian mengenai peran Fraksi PSI dalam mendorong efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga politik modern mencoba menerapkan nilai-nilai *good governance* di tengah kompleksitas birokrasi pemerintahan daerah. Melalui kegiatan magang di Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, penulis memperoleh kesempatan langsung untuk memahami bagaimana proses administrasi, koordinasi antarfraksi, serta hubungan kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Kota dijalankan. Dari situ dapat dianalisis sejauh mana praktik tata kelola kelembagaan DPRD telah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dalam konteks teori administrasi publik, tata kelola kelembagaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi organisasi, tetapi juga dengan legitimasi publik terhadap proses pemerintahan. Teori *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP (1997) menekankan delapan prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting bagi lembaga publik, termasuk DPRD, dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam lembaga legislatif, *good governance* tercermin melalui pelaksanaan fungsi legislasi yang partisipatif, fungsi pengawasan yang objektif, serta penggunaan anggaran yang transparan. Melalui pendekatan ini, tata kelola kelembagaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus memperkuat akuntabilitas politik di tingkat daerah. Oleh karena itu, memahami bagaimana Fraksi PSI mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kegiatan legislatif sehari-hari menjadi penting untuk mengukur efektivitas peran lembaga dalam mendorong reformasi kelembagaan.

Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks reformasi birokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur urusannya sendiri. Namun, pelaksanaan otonomi ini juga menimbulkan tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga daerah. Oleh karena itu, keberadaan fraksi-fraksi di DPRD yang memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik, seperti Fraksi PSI, dapat menjadi penggerak reformasi kelembagaan di tingkat lokal.

Penelitian ini juga memiliki urgensi dalam konteks pembangunan demokrasi lokal. Demokrasi tidak hanya diukur dari proses pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana lembaga perwakilan rakyat menjalankan fungsinya secara efektif dan terbuka terhadap partisipasi publik. Fraksi PSI dengan pendekatan politiknya yang inklusif memberikan contoh bagaimana politik dapat dijalankan dengan cara yang lebih transparan, partisipatif, dan progresif. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana model politik baru ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola lembaga legislatif di daerah.

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam mendorong efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan di DPRD Kota Surabaya serta menilai sejauh mana tata kelola kelembagaan yang diterapkan sesuai dengan prinsip *good governance*. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam praktik kerja kelembagaan Fraksi PSI. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang tata kelola kelembagaan legislatif di tingkat daerah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang administrasi publik dan demokrasi lokal. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPRD Kota Surabaya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan, serta menjadi referensi bagi fraksi-fraksi lain dalam memperkuat prinsip *good governance* di lingkungan legislatif daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan magang, tetapi juga pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kelembagaan, struktur politik lokal, serta penerapan nilai-nilai pemerintahan yang baik di tingkat legislatif. Kajian terhadap Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana lembaga politik baru dapat menjadi penggerak perubahan dalam sistem politik lokal yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni memahami secara mendalam bagaimana tata kelola kelembagaan DPRD Kota Surabaya dijalankan serta bagaimana Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berperan dalam mendorong efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap dinamika kelembagaan, interaksi antarfraksi, serta proses pengambilan keputusan yang terjadi di lingkungan DPRD Kota Surabaya.

Dalam konteks penelitian sosial dan kelembagaan, pendekatan kualitatif sangat penting untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif dan kontekstual. (Moleong, Lexy, 2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan melalui cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya berfokus pada data kuantitatif, melainkan lebih menekankan makna di balik proses, interaksi, serta pengalaman empiris yang diperoleh selama magang.

LOKASI DAN WAKTU

Kegiatan magang dilaksanakan di kantor Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 18–22, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Gedung DPRD Kota

Surabaya merupakan pusat kegiatan legislatif daerah di mana seluruh aktivitas rapat, pembahasan kebijakan, serta koordinasi antarfraksi dilakukan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Fraksi PSI memiliki karakteristik politik yang unik, yaitu menjunjung tinggi nilai transparansi dan keterbukaan publik dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta pengawasan.

Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, dimulai pada 4 Agustus- 10 Oktober 2025. Selama kurun waktu tersebut, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan administratif, mengikuti berbagai rapat fraksi dan komisi, serta mendampingi staf dalam kegiatan dokumentasi kelembagaan. Jadwal kegiatan mengikuti kalender kerja DPRD Kota Surabaya dengan pembagian waktu Senin hingga Jumat pukul 08.00–16.00 WIB. Beberapa kegiatan juga berlangsung di luar jam kerja, seperti agenda kunjungan lapangan (sidak) dan rapat paripurna.

Pelaksanaan kegiatan magang yang relatif panjang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami secara mendalam mekanisme kerja kelembagaan legislatif, terutama dalam konteks kolaborasi antarfraksi dan antara legislatif dengan eksekutif. Selain itu, durasi tersebut memungkinkan peneliti melakukan observasi terhadap perubahan dinamika politik yang terjadi selama masa pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan salah satu agenda penting DPRD Kota Surabaya pada periode tersebut.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai sumber informasi yang dapat memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara informal. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif serta valid.

1. Observasi Langsung

Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan magang di lingkungan DPRD. Observasi dilakukan terhadap aktivitas rapat fraksi, rapat komisi, dan rapat paripurna, serta proses penyusunan laporan kegiatan dan pembahasan kebijakan daerah. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengamati pola komunikasi antaranggota fraksi, gaya kepemimpinan pimpinan fraksi, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda pembahasan kebijakan publik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan arsip internal fraksi seperti risalah rapat, notulensi, laporan kegiatan, serta dokumen resmi DPRD terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan RAPBD. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai bahan verifikasi terhadap hasil observasi dan untuk memperkuat analisis deskriptif. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa berita resmi DPRD, siaran pers, serta unggahan media sosial Fraksi PSI yang berkaitan dengan agenda politik dan pengawasan publik.

3. Wawancara Informal

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan staf dan tenaga ahli fraksi untuk mendapatkan pandangan mereka terkait dinamika kerja kelembagaan DPRD. Wawancara informal memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih terbuka dan alami, khususnya mengenai tantangan yang dihadapi fraksi dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Beberapa wawancara juga dilakukan dengan anggota fraksi dan pegawai sekretariat DPRD untuk memahami hubungan kerja antarunit dan proses koordinasi kelembagaan.

Ketiga teknik tersebut saling menguatkan sehingga menghasilkan data yang mendalam dan kontekstual. Melalui triangulasi antara observasi, dokumentasi, dan wawancara, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan tata kelola kelembagaan di Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi, mengelompokkan, dan menafsirkan hasil observasi serta dokumentasi berdasarkan teori administrasi publik dan *good governance*. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana peran Fraksi PSI mendukung efektivitas fungsi DPRD melalui aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Data yang diperoleh dari kegiatan magang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut *Miles dan Huberman (1994)*, analisis data kualitatif mencakup tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

ANALISIS PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Selama masa magang, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga terlibat secara aktif dalam kegiatan pendampingan administratif dan dokumentasi kelembagaan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan fraksi sekaligus memperkuat pemahaman peneliti terhadap proses kerja lembaga legislatif. Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap observasi lapangan, tahap partisipasi administratif, dan tahap evaluasi hasil kegiatan.

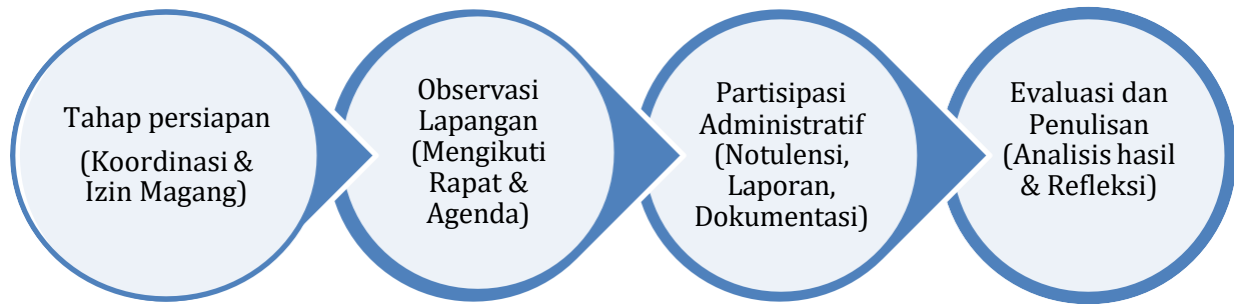
Tahap persiapan dimulai dengan pengurusan administrasi magang, koordinasi dengan pembimbing lapangan, dan orientasi kelembagaan. Pada tahap ini, peneliti mendapatkan penjelasan mengenai struktur organisasi DPRD, pembagian tugas antarfraksi, serta tata tertib rapat.

Tahap observasi lapangan dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat internal fraksi, sidang paripurna, dan rapat gabungan antarfraksi. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana proses legislasi dan pengawasan dijalankan serta bagaimana setiap anggota fraksi berkontribusi dalam pembahasan kebijakan.

Tahap partisipasi administratif dilakukan dengan membantu penyusunan notulensi rapat, mengarsipkan dokumen kelembagaan, serta menyiapkan laporan kegiatan fraksi. Keterlibatan aktif dalam kegiatan administrasi ini memberikan pengalaman praktis tentang tata kelola birokrasi legislatif.

Tahap terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan, yang dilakukan dengan mendiskusikan hasil magang bersama pembimbing lapangan dan staf fraksi. Evaluasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi capaian kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan kelembagaan di masa mendatang.

Untuk memperjelas tahapan pelaksanaan pendampingan selama magang, berikut ini disajikan bagan alur kegiatan penelitian:



Gambar 1. Bagian Alur Kegiatan

Bagan tersebut menggambarkan bahwa seluruh proses magang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi akhir. Setiap tahap saling berkaitan untuk memastikan bahwa kegiatan magang tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga menghasilkan pemahaman akademis mengenai tata kelola kelembagaan DPRD. Analisis terhadap pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa kegiatan magang memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas mahasiswa, terutama dalam kemampuan komunikasi birokrasi, penulisan administrasi pemerintahan, serta pemahaman terhadap sistem pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Selain itu, keterlibatan langsung dalam kegiatan rapat dan penyusunan laporan memperkuat pemahaman tentang pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan magang yang sistematis dan berbasis partisipasi aktif ini menjadi model pembelajaran yang efektif untuk menghubungkan teori administrasi publik dengan praktik pemerintahan di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran etis dan profesional tentang pentingnya tata kelola kelembagaan yang baik dalam memperkuat demokrasi lokal.

HASIL dan PEMBAHASAN

Magang di Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Kota Surabaya memberikan pengalaman yang sangat penting dalam memahami cara kerja lembaga legislatif daerah secara langsung, mulai dari cara mengelola kelembagaan hingga menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan. Dalam empat puluh hari, peneliti berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan administratif, mengikuti rapat-rapat fraksi, serta membantu dalam penyusunan laporan kegiatan. Hasil dari magang ini menunjukkan peran penting Fraksi PSI dalam membangun tata kelola kelembagaan yang modern, transparan, dan melibatkan banyak pihak di DPRD Kota Surabaya. Hasil penelitian ini dianalisis dari dua aspek utama, yaitu pelaksanaan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan DPRD, serta peran Fraksi PSI dalam meningkatkan efektivitas kedua fungsi tersebut. Analisis juga meninjau bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam berbagai aktivitas kelembagaan dan bagaimana partisipasi mahasiswa magang membantu proses administrasi serta dokumentasi di fraksi.

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya

Fungsi legislasi adalah tugas utama DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang bertanggung jawab dalam menyusun peraturan daerah (Perda) bersama pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi, Fraksi PSI aktif terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta kebijakan lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan selama masa magang adalah mengikuti rapat-rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam proses tersebut, Fraksi PSI menunjukkan sikap politik yang progresif dengan memfokuskan pada isu-isu penting seperti pemerataan pembangunan ekonomi, digitalisasi layanan public, peningkatan kesejahteraan Masyarakat, serta penguatan pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PSI juga aktif memberikan masukan mengenai penyusunan anggaran yang adil dan efisien, serta menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pembahasan. Proses legislasi di DPRD Kota Surabaya berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penyampaian nota keuangan oleh pemerintah kota, dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD, hingga penetapan dalam rapat paripurna. Dalam setiap tahapan, Fraksi PSI berusaha menjaga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dengan mengandalkan argument berbasis data dan hasil evaluasi lapangan.

Selain itu, Fraksi PSI juga aktif dalam Menyusun dan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda non-anggaran seperti Raperda tentang Perlindungan Pekerja Perempuan, Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan, serta Peningkatan Layanan Publik Digital. Pandangan umum fraksi ini menunjukkan bahwa PSI tidak hanya focus pada isu ekonomi, tetapi juga menggarisbawahi aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2. Mendengarkan Pandangan Umum yang disampaikan beberapa Fraksi, termasuk PSI.

Selama kegiatan magang, peneliti mengamati bahwa proses legislasi di Fraksi PSI dijalankan secara kolektif dan partisipatif. Setiap anggota fraksi diberi ruang untuk memberikan masukan terhadap naskah kebijakan, sementara staf administrasi dan tenaga ahli bertugas mendukung penyusunan naskah akademik, risalah rapat, serta dokumentasi

kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi di Fraksi PSI mencerminkan penerapan tata kelola kelembagaan yang baik melalui koordinasi yang solid, transparansi dalam pembahasan, dan partisipasi aktif seluruh anggota tim fraksi.

2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Selain fungsi legislasi, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi lapangan, Fraksi PSI menjalankan fungsi pengawasan melalui beberapa mekanisme, antara lain rapat kerja komisi, inspeksi lapangan (*sidak*), dan penyampaian laporan hasil pengawasan. Peneliti turut mendampingi Anggota Dewan PSI dalam kegiatan *sidak* bersama Komisi B DPRD ke Rumah Potong Hewan Tambak Osowilangun, yang bertujuan untuk memeriksa kebersihan, sistem sanitasi, serta pengelolaan limbah. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa Fraksi PSI berkomitmen untuk memastikan kebijakan publik di bidang kesehatan dan lingkungan dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam rapat-rapat pengawasan, Fraksi PSI juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran serta perlunya peningkatan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Fraksi PSI mendorong adanya evaluasi periodik terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih



kegiatan maupun pemborosan anggaran.

Gambar 3. Kegiatan kunjungan lapangan (*sidak*) bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya ke Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun.

Fungsi pengawasan yang dilakukan Fraksi PSI tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Hal ini terlihat dari upaya fraksi untuk mengawal program-program prioritas Pemkot Surabaya agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Misalnya, dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD, Fraksi PSI mengkritisi pelaksanaan program yang belum tepat sasaran serta mengusulkan peningkatan transparansi data penerima manfaat bantuan sosial.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan di Fraksi PSI menunjukkan bahwa lembaga legislatif daerah memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara DPRD dan eksekutif. Melalui mekanisme pengawasan yang transparan dan berbasis data, DPRD dapat memperkuat akuntabilitas publik serta memastikan terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan efisien.

3. Tata Kelola Kelembagaan Dan Penerapan Prinsip Good Governance

Tata Kelola kelembagaan DPRD Kota Surabaya, khususnya di Fraksi PSI, menunjukan penerapan yang kuat terhadap prinsip good governance. Berdasarkan hasil observasi, ada 3 aspek utama yang menonjol, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi public.

Aspek transparansi terlihat dari keterbukaan Fraksi PSI dalam menginformasikan agenda rapat, hasil pembahasan kebijakan, serta publikasi pandangan fraksi melalui laman resmi dan media sosial. Setiap keputusan fraksi didasarkan pada hasil diskusi terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga publik dapat memantau kinerja legislatornya secara langsung.

Aspek akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan kegiatan yang terstruktur. Setiap kegiatan fraksi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dilaporkan secara tertulis dan terdokumentasi. Laporan kegiatan tidak hanya diserahkan kepada pimpinan DPRD, tetapi juga dipublikasikan secara berkala untuk kepentingan publik.

Sementara itu, aspek partisipasi publik diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi. Fraksi PSI secara rutin mengadakan forum diskusi publik dan membuka kanal pengaduan masyarakat melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak hanya berfungsi sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penerapan ketiga prinsip tersebut memperlihatkan bahwa Fraksi PSI berupaya membangun tata kelola kelembagaan yang modern dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan teori good governance yang dikemukakan oleh *UNDP (1997)*, yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, Fraksi PSI dapat dikategorikan sebagai salah satu fraksi yang menerapkan model tata kelola legislatif progresif di tingkat daerah.

4. Analisis Temuan dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan magang menunjukkan bahwa peran Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya dalam mendorong efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan sangat dipengaruhi oleh tata Kelola kelembagaan yang diterapkan. Koordinasi yang baik antar anggota fraksi, keterbukaan dalam pembahasan, serta dukungan tenaga ahli yang kompeten menjadi faktor pendukung utama keberhasilan fraksi dalam menjalankan perannya. Namun, terdapat pula beberapa hambatan yang diidentifikasi selama magang. Pertama, keterbatasan waktu yang relative singkat membuat proses observasi tidak mencakup seluruh kegiatan kelembagaan. Kedua, jadwal rapat yang padat dan sering berubah menuntut adaptasi cepat dari mahasiswa magang, ketiga, ruang partisipasi mahasiswa dalam pengambilan Keputusan masih terbatas karena bersifat administratif.

Meskipun demikian, kegiatan magang ini tetap berhasil memberikan gambaran empiris yang kuat mengenai bagaimana teori administrasi publik dan *good governance* diterapkan dalam praktik. Fraksi PSI terbukti menjalankan fungsi politiknya secara profesional dan akuntabel, serta menjadi contoh bagaimana partai politik baru dapat memperkenalkan budaya politik yang bersih dan transparan di tingkat legislatif daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan yang baik berpengaruh

signifikan terhadap efektivitas fungsi DPRD. Fraksi PSI melalui praktik kerjanya telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan daerah di Kota Surabaya.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* di Fraksi PSI tampak dalam setiap kegiatan kelembagaan. Transparansi terlihat dari keterbukaan rapat dan publikasi hasil kegiatan. Akuntabilitas diwujudkan melalui dokumentasi rapat dan laporan publik, sedangkan partisipasi masyarakat diperkuat melalui forum aspirasi dan keterlibatan publik dalam penyusunan pandangan fraksi. Meskipun kegiatan magang berjalan lancar, beberapa kendala tetap muncul seperti keterbatasan waktu magang yang singkat dan padatnya jadwal rapat. Namun, pengalaman ini memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman mahasiswa tentang sistem kerja lembaga legislatif serta peran strategis fraksi dalam pengawasan dan pembentukan kebijakan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman selama magang, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan Fraksi PSI di DPRD Kota Surabaya telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara nyata. Fraksi PSI berhasil menunjukkan kinerja legislatif yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, baik dalam fungsi legislasi maupun pengawasan. Penerapan tata kelola yang baik memperkuat efektivitas lembaga legislatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Surabaya.

Kegiatan magang ini membuktikan bahwa lembaga legislatif daerah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai arena pembelajaran sosial dan politik. Melalui pengamatan langsung, mahasiswa memperoleh pengalaman empiris yang memperkaya wawasan akademik dan membentuk kesadaran kritis terhadap praktik pemerintahan yang baik. Bagi Fraksi PSI, disarankan untuk terus memperkuat sistem informasi digital dan forum partisipasi publik agar transparansi dan keterlibatan masyarakat semakin meningkat. DPRD Kota Surabaya secara keseluruhan juga perlu memperkuat kolaborasi antarfraksi dalam penyusunan kebijakan publik agar keputusan yang diambil lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain itu, universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu memperluas program magang di lembaga legislatif agar mahasiswa memperoleh pemahaman praktis tentang dinamika tata kelola pemerintahan. Kegiatan magang semacam ini dapat menjadi sarana kolaborasi akademik antara kampus dan lembaga pemerintahan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten di bidang administrasi publik.

Dengan penerapan prinsip *good governance* secara berkelanjutan, DPRD Kota Surabaya diharapkan dapat menjadi model kelembagaan legislatif daerah yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fraksi PSI telah membuktikan bahwa politik yang

bersih, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat menjadi landasan utama dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiansyah, A. (2025). Pastikan Layak dan Aman, DPRD Surabaya Segera Sidak RPH Tambak Osowilangun. *MEMORANDUM.Co.Id*.

<https://memorandum.disway.id/surabaya/read/136309/pastikan-layak-dan-aman-dprd-surabaya-segera-sidak-rph-tambak-osowilangun>

DPRD Kota Surabaya. (2025). *DPRD Kota Surabaya Gelar Paripurna Bahas Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan APBD 2026*. <https://dprd.surabaya.go.id/detail-berita/dprd-kota-surabaya-gelar-paripurna-bahas-pandangan-umum-fraksi-atas-rancangan-apbd-2026>

Moleong, Lexy, J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Puspaningtyas, A., Indartuti, E., Rahmadanik, D., Basyar, M. R., & Hariyoko, Y. (2022). *Buku Pedoman Magang Program Studi Administrasi Negara* (pp. 1–36). <https://publik.untag-sby.ac.id/web/download>

waldo, dwight. (n.d.). *the study of Public Administration*.

<https://hostnezt.com/cssfiles/publicadmin/The Study of Public Administration By DWIGHT WALDO.pdf>